

Redaksi

Penanggung Jawab:
Dyah N.K. Makhijani
Pemimpin Redaksi:
Difi A. Johansyah
Redaksi Pelaksana:
Harymurthy Gunawan,
Rizana Noor, Dedy Irianto,
Risanthy Uli N

Alamat Redaksi

Humas Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin 2 - Jakarta
Telp. : 021 - 3817317,
3817187
email : humasbi@bi.go.id,
website : www.bi.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan.

Foto: "Merah Putih"
oleh Wildan

gerai info

Edisi XVII | Agustus 2011 | Tahun 2 | Newsletter Bank Indonesia

MEJA REDAKSI

Pembaca yang budiman,
Minal Aidin wal Faizin,
mohon maaf lahir batin.

Pada edisi kali ini, redaksi ingin mengajak Anda untuk melihat wajah perbankan syariah di dalam negeri. Bila mendengar kata "syariah" di belakang kata bank sekilas memang akan cepat kita berasumsi bahwa bank ini khusus untuk umat Muslim. Benarkah demikian? Inilah yang ingin dijelaskan pada pembahasan kali ini agar kekeliruan persepsi masyarakat bisa diluruskan.

Pembahasan tentang Perbankan Syariah akan mengurai mulai dari hakikat bank syariah itu sendiri, bagaimana Bank Indonesia bersama pelaku industri perbankan syariah bahu membahu mengembangkannya hingga wajah bank syariah termutakhir. Kami berharap dengan sajian tentang bank syariah ini—yang merupakan alternatif layanan perbankan konvensional plus kelebihan-kelebihannya—akan membuka pemahaman yang lebih baik lagi dan sudah barang tentu mulai bersentuhan dengan layanan bank syariah. Selamat membaca.

Salam,
Difi A. Johansyah
Kepala Biro Humas
Bank Indonesia

■ Perbankan Syariah:

“Alhamdulillah Ya ... Sesuatu Banget”

Ketika mendengar kata “syariah”, barangkali pikiran sebagian orang akan langsung membayangkan sekumpulan ayat-ayat Al-Qur’an yang berisi dogma agama yang hanya berlaku bagi umat Islam. Oleh karena itu ketika kata “syariah” digabungkan dengan kata “bank” menjadi bank syariah, mungkin tidak salah juga bila sebagian orang memiliki persepsi bahwa bank syariah hanya untuk orang Islam. Tapi, apa iya begitu?

Ternyata, *nggak juga tuh*. Secara definisi bank syariah memang merupakan bank yang dijalankan dengan merujuk prinsip-prinsip Islam terkait syariah *mu’amalah* yang didalamnya mengatur hubungan horisontal (manusia dan lingkungannya) termasuk kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip penghindaran riba. Akan tetapi bila ditelisik lebih dalam makna kata syariah ternyata mengandung nilai-nilai yang bersifat universal seperti keadilan dalam bertransaksi, investasi yang mengedepankan perilaku etis, nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi serta azas kemanfaatan. Bila nilai-nilai itu diberlakukan, bukankah muaranya akan membawa kemaslahatan bagi semua umat manusia baik yang Muslim maupun non-Muslim.

Kalau melihat nilai-nilai syariah seperti itu, memang sejatinya *kan nggak* ada kaidah agama dan kepercayaan manapun yang menentangnya bahkan akan mengamini kebenaran prinsip-prinsip universalitas syariah. Lebih jauh lagi nilai tersebut sebenarnya sudah tersebar dalam warisan (*heritage*) nilai luhur budaya Nusantara. Misalnya, nilai kebersamaan dan persaudaraan tercermin dalam praktik-praktik bagi hasil pada masyarakat agraris seperti *maro*, *mertelu*, *belah pinang* atau *baku bagi*. Dengan melihat gambaran ini maka kesan eksklusif perbankan syariah yang hanya untuk umat Muslim tidaklah tepat karena secara natural ia bersifat terbuka (inklusif) bagi seluruh segmen masyarakat.

Dengan sifatnya yang terbuka maka pendekatan terhadap upaya pengembangan perbankan syariah diarahkan pada karakter nilai-nilai bank syariah yang bersifat universal. Hasilnya, cakupan perbankan syariah mulai menjangkau nasabah non-Muslim. Misalnya, mantan ratu pebulutangkis nasional Susi Susanti kini menjadi salah satu pengusaha yang merasakan manfaat bank syariah. Begitu pula banyak pengusaha non-Muslim lain di berbagai daerah yang juga menjadi nasabah bank syariah.

Bertambah luasnya jangkauan nasabah bank syariah semakin mendorong perkembangan industri tersebut. Tengok saja data perkembangan jumlah dan jaringan layanan bank syariah yang per akhir Juli 2011 tercatat sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 155 BPR Syariah. Layanan perbankan syariah berjumlah 3540 jaringan kantor yang siap melayani masyarakat Indonesia yang tersebar di 33 provinsi, termasuk kantor cabang bank konvensional yang menyediakan layanan syariah (*office channeling*). Jaringan layanan perbankan syariah juga sudah terhubung dengan jaringan ATM Bersama dan ATM Prima (ATM BCA) serta fasilitas *mobile banking*, yang siap melayani semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Sementara itu, ditilik dari kepemilikan rekening, terjadi juga peningkatan signifikan yang pada tahun 2006 hanya tercatat 2,6 juta melonjak menjadi 8 juta rekening (2011).

Bagaimana bank syariah mampu membukukan prestasi sedemikian *kinclong*? Sudah barang tentu itu semua tak lepas dari kerja keras para penggiat perbankan syariah, baik Dewan Syariah Nasional (DSN), pelaku industri dan kelompok masyarakat lainnya. Namun dibalik itu semua, ada peran Bank Indonesia (BI) selaku regulator yang signifikan dalam memajukan perbankan syariah.

Berbagai upaya digagas bank sentral agar kinerja bank syariah terus meroket seperti merilis Cetak Biru Perbankan Syariah di tahun 2002 sebagai *grand design* pengembangan industri jangka panjang menuju signifikansi peran perbankan syariah yang lebih besar dalam perekonomian nasional dan menjadi industri terkemuka di ASEAN pada 2012. Bahkan, sejak tahun lalu Indonesia telah ditunjuk sebagai *center of excellence* untuk Islamic Microfinance oleh APRACA (*Asia Pacific Rural & Agriculture Credit Association*). Selain itu, BI juga merilis Rencana Strategis Pengembangan Pasar (*Market Development Strategic Plan*) di tahun 2008 untuk mempertajam strategi komunikasi dan pengembangan produk yang ingin memposisikan perbankan syariah menjadi lebih dari sekadar bank (*beyond banking*).

Nah, dengan gambaran seperti uraian di atas, semakin jelas bahwa keberadaan perbankan syariah dalam sistem perekonomian Indonesia membawa manfaat secara luas, yang harapannya mampu pula menjawab persoalan-persoalan kesejahteraan, keadilan dan keluhuran perilaku dalam kegiatan ekonomi. Jika harapan itu tercapai, maka alhamdulillah ya ... jadi “sesuatu banget”. ●

Ngurus Bank Syariah Dari Ujung ke Ujung

Cikal bakal kelahiran perbankan syariah dapat ditelusuri pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam beleid itu tersurat adanya dua sistem perbankan (*dual banking system*) yakni perbankan syariah dan perbankan konvensional. Namun sayangnya gerak langkah perbankan syariah hingga tahun 2006 masih terbilang lambat yang diperlihatkan penguasaan pangsa pasar yang hanya 1,5% saja. Untuk itulah, Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) Bank Indonesia ditugaskan untuk mengembangkan industri perbankan syariah dalam rangka mendukung pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) melalui penyediaan beragam produk dan jasa layanan perbankan

syariah serta memperluas cakupan masyarakat dalam sistem keuangan (*financial inclusion*).

Dalam konteks pengembangan, pekerjaan rumah terbesar DPbS BI adalah meningkatkan volume usaha perbankan syariah sehingga mampu memainkan peran signifikan dalam mendukung perekonomian nasional terutama untuk memperkuat aktivitas produktif di sektor riil. Rupanya untuk menggapai maksud itu, ada daftar panjang isu krusial yang kudu diikhtiarkan seperti meningkatkan daya saing, perbaikan *positioning* bank syariah, insentif regulasi hingga meningkatkan dukungan Pemerintah, misalnya berupa penempatan dana BUMN di bank syariah.

1. Pengembangan SDM dalam jumlah dan mutu yang mencukupi kebutuhan industri ini
2. Penyempurnaan regulasi dan mengembangkan sistem pengawasan yang efektif
3. Pengembangan infrastruktur keuangan pendukung yang dapat meningkatkan efisiensi operasi dan daya saing perbankan syariah
4. Pengembangan aliansi strategis dan kolaborasi perbankan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya
5. Pengembangan inovasi produk dan layanan jasa yang unggul dan khas perbankan syariah
6. Pengembangan pasar melalui edukasi perbankan syariah yang efektif termasuk pemberdayaan/perindungan nasabah
7. Meningkatkan kepatuhan bank pada norma dan prinsip syariah

Untuk menggapai tugas tersebut, DPbS memiliki 8 (delapan) Tim yang bertugas melakukan fungsi penelitian, pengaturan, pengawasan, pengembangan produk dan edukasi, review kebijakan, penyediaan informasi, pengembangan sistem pengawasan hingga perizinan. Salah satu upaya yang digagas adalah merilis Cetak Biru Perbankan Syariah pada tahun 2002 sebagai *grand design* pengembangan jangka panjang industri perbankan syariah nasional. Cetak Biru ini punya 7 (tujuh) area yang menjadi fokus garapan pengembangan bank syariah ke depan (*Lihat: Tabel*). Dari sinilah mengalir beragam kebijakan sebagai implementasinya, antara lain Rencana Strategis Pengembangan Pasar (*Market Development Strategic Plan/MDSP*) di tahun 2008 yang merupakan penjabaran butir keenam Cetak Biru, Rencana Strategis Pengembangan SDM (*Human Capital Strategic Plan/HCS*) penjabaran Butir 1, juga beragam ketentuan dan regulasi terkait perbankan syariah yang merupakan sebagian produk DPbS BI.

Nah, dengan dilakukannya pengelolaan sistem perbankan syariah dari ujung ke ujung oleh delapan Tim dalam satu atap DPbS, maka upaya mengurus bank syariah mulai dari memberi izin, mengatur, mengembangkan hingga mengawasi bisa dilakukan secara terintegrasi.●

Kurangi Risiko Dengan Silaturahmi



Difi A. Johansyah,
Kepala Biro Humas BI

Satu istilah keuangan yang dapat saya pahami tapi tidak bisa sepenuhnya saya terima rasionalitasnya adalah istilah premi risiko. Sebagaimana dimaklumi, premi risiko dalam pasar keuangan adalah biaya tambahan (biasanya dalam persentase) yang dikenakan pemberi pinjaman kepada peminjam yang dianggapnya memiliki risiko. Ini memang wajar dari sisi pemberi pinjaman karena dia dianggap mengambil risiko dengan memberikan pinjaman kepada dunia usaha yang punya risiko usaha.

Nah disinilah saya melihat adanya sesuatu yang *nggak* beres karena kita seringkali hanya melihat dari sisi pemberi pinjaman, apakah itu bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagaimana dengan debitur atau nasabah peminjamnya? Saya sulit memahami rasionalitas kenapa debitur harus menerima tambahan premi risiko karena seringkali premi risiko bersifat subjektif sepihak dari sisi pemberi pinjaman.

Saya bisa memahami premi risiko yang diberikan kepada debitur yang memang nakal baik dari perbuatan maupun niatnya. Misalnya nasabah yang sengaja ngemplang utang. Tapi bukankah masih banyak debitur lain yang memang “malang” karena usahanya gagal karena faktor diluar kemampuannya alias nasib! Mana simpati kita terhadap mereka ini yang masih memiliki niat dan itikad baik untuk berusaha tetapi belum mujur. Belum lagi calon debitur yang merupakan usahawan pemula yang malah sama sekali tidak punya riwayat usaha sebelumnya sehingga dianggap juga berisiko. Apakah wajar dosa yang disebabkan debitur nakal dibebankan ke semua debitur lain yang kurang beruntung tadi?

Susahnya, ada bank yang seringkali *nggak* mau repot dan menyamaratakan saja kedua jenis debitur ini. Semuanya berisiko sehingga layak untuk dikenakan suku bunga pinjaman lebih tinggi dengan alasan untuk melindungi bank! Saya katakan bank *nggak* mau repot karena tidak ada keinginan bank untuk mengenal lebih dalam nasabahnya yang “berisiko” tadi. Atau paling tidak berkenalan lebih jauh, karena siapa tahu nasabah yang dianggap bermasalah tadi malah punya potensi besar. Bank dapat menjadi diskriminatif dan gampang seperti berburu di kebun binatang dengan lebih suka *ngurusin* nasabah-nasabahnya yang sudah mapan.

Untuk itu saya melihat pentingnya bank dan nasabahnya saling mengenal dan bersilaturahmi sehingga tidak terlalu pusing dengan itung-itungan premi risiko di atas. Dimana-mana usaha itu memang ada risikonya tapi kalau bisa risiko itu dihitung dan ditanggung bersama sehingga tidak merugikan salah satu pihak saja. Disamping itu, dengan saling mengenal maka persepsi risiko itu bisa diturunkan bersama-sama. Pertanyaannya, emang ada praktek perbankan seperti ini?

Disinilah saya melihat peran bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Prinsip ukhuwah alias kebersamaan mendasari adanya kemitraan yang menjadi salah satu pilar penting perbankan syariah. Sebagai sistem keuangan alternatif, perbankan syariah dengan prinsip kemitraan ini dapat berperan penting mengatasi kesenjangan keadilan dan ketidakpercayaan antara bank dengan debiturnya. Kemitraan yang berdasarkan kepada kepercayaan dan gotong royong kiranya dapat kembali mengangkat unsur humanisme dan kebersamaan masyarakat dalam ekonomi yang rasanya sekarang ini sarat dengan unsur eksploitasi dan diskriminasi. Bagi saya, menggeliatnya perbankan syariah, membuka wacana dan pemikiran baru di luar batas-batas agama yang tadinya menjadi cap yang melekat di bank syariah. Perbankan syariah membuka pintu kepada penemuan kembali nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk sosial ekonomi yang dari dulu sudah ada, yakni gotong royong. Mudah-mudahan penemuan kembali ini bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke depan.●

Perbankan Syariah Indonesia ... Rancak Bana!!!



Nasirwan,
Peneliti Bank Madya,
Direktorat Perbankan Syariah BI

Apakah capaian yang sudah diraih setelah dua dasa warsa kita mengembangkan perbankan syariah di tanah air? Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia tahun 1992, bank syariah bertumbuh relatif pesat. Perkembangan ini tidak lepas dari fenomena global maraknya pemanfaatan sistem keuangan syariah yang terjadi di beberapa negara Eropa, Afrika, Asia dan tentu saja kawasan Timur Tengah. Di Indonesia sendiri, dalam kurun waktu satu dekade terakhir saja total aset industri ini telah meningkat lebih dari 64 kali lipat, dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 116,0 triliun per Juli 2011. Laju pertumbuhan aset secara impresif tercatat 51,3% per tahun (yoy, rata-rata pertumbuhan dalam 10 tahun terakhir). Tahun lalu, perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang tinggi yaitu sebesar 46,92% (yoy).

Memang usaha untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasi bank syariah untuk lebih baik atau setidaknya setara dengan jasa keuangan lainnya adalah pekerjaan yang tiada henti. Ketika itu dapat dicapai maka impian menjadikan bank syariah 'lebih dari sekedar bank' akan semakin riil dirasakan masyarakat. Terutama ketika hal ini diikuti dengan konsistensi bank syariah menjalankan norma dan kaidah syariah secara baik. Karena dari sinilah muncul *intangible advantages* misalnya rasa tentram bahwa jasa keuangan ini lebih sesuai dengan tuntutan syariah, secara *built-in* melakukan pula fungsi-fungsi sosial yang bertujuan untuk distribusi kekayaan kaum berpunya kepada masyarakat kurang beruntung melalui instrumen zakat, sadaqah dan wakaf; serta secara konsep dasar operasinya dari awal sudah sejalan dengan semangat *ethical banking* dan bank ramah lingkungan (*green banking*).

Setelah menembus total aset lebih dari Rp100 triliun di akhir tahun lalu, dengan laju pertumbuhan rata-rata seperti tersebut di atas, maka diproyeksikan menjelang akhir 2012 aset bank syariah nasional dapat mencapai 5% dari

total aset industri perbankan nasional, dengan perkiraan total aset Rp176 triliun. Angka ini yang secara psikologis mengukuhkan signifikansi perbankan syariah dalam lanskap perbankan kita. Selain itu, pada tahun 2020 dimana keterbukaan sektor keuangan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN berlaku, diharapkan aset bank syariah nasional dapat mencapai *share* 13% hingga 15% dengan perkiraan volume usaha mencapai Rp900-980 triliun.



Sebagian pihak menilai bahwa pencapaian saat ini khususnya dari sisi pangsa pasar relatif lambat bila dibandingkan dengan potensi yang ada. Apalagi bila diperbandingkan dengan posisi yang sudah dicapai negara lain seperti Iran, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirate Arab, Kuwait, dan Bahrain. Namun perlu diingat bahwa selain negara-negara tersebut telah jauh lebih dahulu mengembangkan perbankan syariah, yaitu sejak awal 1980-an, tingkat akseptabilitas masyarakat dan keterlibatan pemerintah dalam menggunakan bank syariah sangatlah besar. Kita di Indonesia perlu melewati *fase* panjang untuk menumbuh kembangkan *awareness* banyak pihak untuk meyakinkan bahwa bank syariah adalah sistem perbankan yang menguntungkan semua pihak dan memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan perbankan syariah kita dilakukan melalui pendekatan *gradual* dengan memperhatikan kesesuaian sisi permintaan dan penawaran. Ini untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhannya.

Dalam pengembangan perbankan syariah, Indonesia cenderung memberikan tekanan penting pada pemenuhan norma dan kaidah dasar keuangan syariah dalam sistem operasi dan pengembangan produk perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional - MUI merupakan garda terdepan dalam mengawal kepatuhan pada norma dan kaidah syariah karena disanalah letak kekuatan, keunggulan dan kemaslahatan dari sistem perbankan ini bagi pemangku kepentingan dan perekonomian secara umum. Langkah berhati-hati dalam menerapkan norma dan kaidah syariah ini pada tingkat tertentu menjadi tantangan tersendiri

bagi pengembangan industri bank syariah ke depan. Hal ini tergambar dari upaya untuk mengoptimalkan dua kepentingan secara baik, yaitu menghasilkan produk dan jasa bank syariah yang secara bisnis menarik, efisien dan menguntungkan semua pihak, serta di sisi lain harus tetap *prudent* dan memenuhi prinsip dasar syariah secara baik.

Konsisten dengan semangat mewujudkan sistem perbankan syariah yang memiliki keunggulan komparatif dan memberikan kontribusi positif pada stabilitas sistem perbankan, sejak satu dekade terakhir ini BI secara intensif mengembangkan regulasi, sistem pengawasan *on-site* dan *off-site*, standar dan panduan *best practices*, dan infrastruktur pendukung industri perbankan syariah yang lengkap. Hingga saat ini, sistem pengaturan dan pengawasan perbankan syariah yang dikembangkan oleh BI dapat dipandang sebagai paling komprehensif dibandingkan negara lain. Terkait itulah maka sejumlah negara terutama yang baru mulai mengembangkan perbankan syariah memilih Indonesia untuk tujuan *benchmarking* kebijakan pengembangan perbankan syariah. Ini telah dilakukan oleh pemerintah/bank sentral Inggris, Korea Selatan, Thailand dan Uganda serta beberapa negara yang tergabung dalam organisasi AMED (ASEAN Middle East Dialogue). Selain itu, terkait dengan kemajuan di bidang *Islamic microfinance*, khususnya peran bank umum syariah, BPR Syariah serta kerjasamanya dengan BMT dan Koperasi Syariah dalam pembiayaan dan pemberdayaan sektor UMKM, organisasi APRACA (Asia Pacific Rural & Agriculture Credit Association) telah menetapkan Indonesia sebagai APRACA Center of Excellence (ACE) on Islamic Microfinance.

Pada berbagai forum dan lembaga internasional terkait perbankan syariah, BI terlibat secara aktif untuk bersama-sama dengan bank sentral dan lembaga multinasional lain mengembangkan infrastruktur global di bidang perbankan syariah. Termasuk mendorong harmonisasi/konvergensi regulasi dan fatwa keuangan syariah, mewujudkan panduan dan standar *best practices* pengaturan dan pengawasan perbankan syariah internasional, serta mendirikan lembaga-lembaga untuk mengatur mekanisme transaksi instrumen dan kegiatan pasar keuangan syariah secara global. Sejumlah lembaga internasional dimana BI terlibat aktif mulai dari pendirian lembaga, menetapkan arah kebijakan dan penyusunan standar internasional adalah Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan International Islamic Liquidity Management (IILM).

Melihat potret perbankan syariah yang kian kinclong, orang Minang bilang... Rancak Bana!!!

iB (ai-Bi): ... Indonesia Bangeettt !



Janu Dewandaru,
Peneliti Bank Madya,
Direktorat Perbankan Syariah BI

Semarak sekali pemberitaan dan Siklan tentang perbankan syariah, yang lebih populer dikenal sebagai iB (ai-Bi) ini. iB adalah singkatan dari Islamic Banking. Tiba-tiba saja iB menjadi sebuah ikon baru yang bertebaran di koran, mengudara di radio, muncul sepanjang liputan mudik lebaran, bahkan iB hadir dalam berbagai peristiwa olahraga semisal Thomas Cup dan pertandingan sepak bola pra-piala dunia di layar kaca. Masyarakat juga terlihat sangat antusias memadati gerai bank syariah yang dibuka di berbagai pameran di ibu kota dan bertransaksi ratusan miliar rupiah. Perbankan syariah tampil sebagai sebuah bank yang “lain”, “unik”,



Sebuah warisan budaya Indonesia (heritage) yang membawa nilai luhur tentang kewelas asihan, empati dan cara memandang manusia “yang lain” (dan alam lingkungan) sebagai yang setara, yang harus diperlakukan dengan rasa cinta kasih serta berkeadilan.

“berbeda”, yang dengan cepat menjadi tren baru dalam gaya hidup ber-banking masyarakat Indonesia. Tapi apanya yang berbeda?

Secara sepintas bank syariah memang terlihat menawarkan produk-produk yang selama ini sudah banyak tersedia di bank konvensional, misalnya Tabungan, Deposito, KPR, KPM, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi bahkan kartu kredit. Namun demikian, kesamaan nama produk “generik” tersebut lebih mencerminkan kesamaan kapabilitas bank syariah dalam melayani rentang kebutuhan masyarakat dengan produk selengkap bank konvensional. Sementara itu, untuk melihat perbedaan dan karakteristik khas dari sistem perbankan syariah kita perlu menyelami secara lebih mendalam lagi. Melampaui disain kemasan pemasarannya.

Karakteristik khas sistem perbankan syariah yang paling

populer disebut sebagai faktor pembeda adalah penggunaan **sistem bagi hasil**. Sistem bagi hasil ini menjadi dasar skema keuangan (*akad*) yang digunakan dalam banyak produk iB, baik pada sisi pendanaan maupun pada sisi pembiayaan. Nasabah penabung mendapatkan bagi hasil yang nilainya ikut membesar sejalan dengan berkembangnya bisnis bank. Sementara itu penerapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja iB atau investasi iB menunjukkan karakter iB yang dijiwai oleh semangat kemitraan: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.

Sistem bagi hasil ini sejatinya sudah dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Kita selalu dapat menemukan praktek-praktek bagi hasil di masyarakat agraris dan maritim dari Sabang hingga Merauke, dengan beragam istilah yang berbeda seperti *maro*, *mertelu*, *baku bagi*, *belah pinang*, *bakongsi*, *romdidi*, *nyadak*, *ngakap* dan lain lain

Dalam praktek yang disebut dengan “*maro*” di banyak daerah di pulau Jawa, misalnya, pemilik lahan menjalin kemitraan dengan petani penggarap yang mengolah tanahnya dan menanaminya dengan padi palawija, merawatnya hingga panen. Di akhir hari, penjualan hasil panen dibagi sama rata 50:50 atau *separo-separo*. Dalam kondisi panen yang baik, hasil penjualan juga besar sehingga yang dibagi hasilkan juga sama-sama besar. Sebaliknya dalam kondisi hasil panen yang sedikit, hasil penjualan yang bisa dibagi-hasilkan juga sama-sama sedikit. Keberlimpahan sama dinikmati, keprihatinan sama dirasakan.

Hampir mirip dengan *maro*, di wilayah Indonesia Timur dikenal praktek “*baku bagi*”. Misalnya nelayan sudah terbiasa bermitra saat berlayar mencari ikan ke laut. Hasil tangkapan ikan dibagi di antara para nelayan yang ikut melaut dengan proporsi sesuai kesepakatan. Dalam cuaca yang bagus, hasil tangkapan akan berlimpah sehingga masing-masing nelayan membawa pulang ikan

yang juga berlimpah. Di saat yang lain, ketika cuaca buruk mungkin hasil tangkapan sangatlah minimal. Namun demikian risiko itupun ditanggung secara bersama-sama oleh mereka. Banyak sama dibawa suka, sedikit sama ditangisi.

Di perbankan syariah, semangat kemitraan seperti itulah yang mendasari produk pembiayaan iB berbasis bagi hasil (*mudharabah*). Misalnya untuk produk pembiayaan modal kerja. Di sisi pendanaan, nasabah penabung Deposito iB “bermitra” dengan pengelola bank syariah. Banknya berkembang, bagi hasil yang diterima nasabah juga ikut membesar.

Contoh yang lain adalah praktek “*bakongsi*” yang merupakan praktek kemitraan usaha di antara pedagang, dimana pihak-pihak yang berkongsi menggabungkan modal, tenaga, waktu, peralatan serta keterampilan untuk mengelola usaha dagang secara bersama-sama (bersyarikat). Perdagangan yang berhasil akan menghasilkan keuntungan, yang kemudian dibagi-hasilkan di antara mereka dengan proporsi sesuai kesepakatan. Sebaliknya jika perdagangan menurun atau merugi, maka risikonya juga ditanggung secara bersama-sama. Di perbankan syariah, kemitraan tersebut tercermin pula dalam produk Pembiayaan Usaha berbasis kemitraan (*musyarakah*).

Itulah beberapa contoh sistem bagi hasil dalam bentuknya yang paling bersahaja. Sebuah warisan budaya Indonesia (*heritage*) yang membawa nilai luhur tentang kewelas asihan, empati dan cara memandang manusia “yang lain” (dan alam lingkungan) sebagai yang setara, yang harus diperlakukan dengan rasa cinta kasih serta berkeadilan. Yang memandang manusia lain sebagai wajah-wajah yang memiliki mimpi-mimpi yang sama. Bahwa kebutuhan dan ketidakberdayaan seseorang tidak boleh dipandang sebagai kesempatan untuk menguasai, tetapi harus dilihat dengan rasa *compassion*, empati dan kebaikan hati untuk menghilangkan ketidakberdayaan itu. Inilah keluhuran yang menjiwai sistem bagi hasil, yang saat ini dihidirkan kembali oleh perbankan syariah. *iB Reinvent the heritage*, membangkitkan kembali warisan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. ●

Rame-Rame Pake Bank Syariah

Bank Syariah Itu lebih dari sekedar bank, begitu pegawai Bank Indonesia kerap bicara soal kelebihan komparatif bank syariah dibanding bank konvensional. Tapi apakah pegawai BI sudah menggunakan produk syariah? Ternyata sudah lho. Buktinya, sejak tahun 2006, BI sudah menggunakan bank syariah sebagai alternatif penyaluran pembayaran gaji. Bahkan di tingkat daerah, sebagai contoh di kantor BI Bandung semua pegawainya sudah menjadi nasabah bank syariah.

Antusiasme memanfaatkan jasa perbankan syariah di masyarakat pun akhir-akhir ini kian marak. Coba dengar apa kata mantan juara dunia bulutangkis Susi Susanti. "Buat saya, bank syariah bukan hanya untuk Muslim, tapi untuk semua kalangan. Mungkin di situ ada beberapa kelebihanlah,

dibanding dengan bank-bank yang lain, soal bunga, dan fleksibel juga." Dalam hal bunga dan fleksibilitas, ia mencontohkan pengalamannya sendiri. "Dari pada membayar tingkat suku bunga tetap ke bank, kami diizinkan untuk menyesuaikan pembayaran sesuai dengan keuntungan kami."

Selain Susi, pemilik jaringan sebuah waralaba kebab Turki, Hedy Setiono yang pernah menerima penghargaan "The Indonesian Small Business Entrepreneur Award" juga memanfaatkan pembiayaan bank syariah dalam mengembangkan waralabanya. Yang luar biasa tatkala sejumlah konglomerat papan atas sudah melirik memanfaatkan jasa bank syariah. Misalnya, sebuah pengembang papan atas perumahan di kawasan Serpong, Banten. Pengembang ini memakai jasa pembiayaan syariah dalam membangun



Antusiasme masyarakat merespons kehadiran perbankan syariah bukan hanya dalam hal pemanfaatan jasa perbankan itu, tapi juga dalam proses edukasi sistem syariah yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri

sejumlah proyek properti di Serpong dan sekitarnya.

Antusiasme masyarakat merespons kehadiran perbankan syariah bukan hanya dalam hal pemanfaatan jasa perbankan itu, tapi juga dalam proses edukasi sistem syariah yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri. Contohnya beberapa universitas Islam negeri, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin dan Universitas Trisakti. Testimoni di atas, mungkin baru sebagian kecil dari sekian banyak contoh riil betapa memang bank syariah sudah dimanfaatkan berbagai segmen masyarakat.

Begitu pula tatkala dunia diperhadapkan krisis keuangan global akibat praktik keuangan yang tidak sehat di Amerika Serikat pada tahun 2008, dunia mencari alternatif sistem keuangan yang lebih sehat dan *fair* seperti dikemukakan Menteri Keuangan Perancis, Christine Lagarde, "Yang kita butuhkan saat ini adalah ekuitas, sistem bagi hasil, moralitas, beretika, dan realita, transaksi riil." ●

Kiprah BI Membangun Keuangan Syariah Global

Seperti apa sih figur industri keuangan syariah di jagad ini? Kalau mau tahu, besaran ukuran industri keuangan syariah dunia menuju angka US\$1 triliun, dengan pelaku lebih dari 600 institusi keuangan dari 75 negara. Mencermati dinamika tersebut, pelaku industri keuangan termasuk perbankan syariah nasional perlu menjadi bagian dinamika global tersebut.

Berangkat dari sudut pandang tersebut, Bank Indonesia secara aktif mengembangkan diplomasi dan kerjasama dengan berbagai elemen industri keuangan syariah internasional. Sejumlah inisiatif telah dirintis BI dalam dekade ini, diantaranya dengan mendirikan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) bersama beberapa bank sentral lain. Dewasa ini, IFSB telah berkembang menjadi *key institution* di industri keuangan syariah dunia, beranggotakan 53 bank sentral dan otoritas pengawasan lembaga

keuangan, serta 142 lembaga keuangan dan asosiasi dari 41 negara.

Sejak berdirinya di tahun 2003, IFSB menjadi media bagi negara-negara pengusung keuangan syariah yang umumnya merupakan *developing countries*, untuk menentukan standar regulasi tersendiri bagi industri keuangan syariah. Standar dimaksud tentunya disesuaikan dengan tahap perkembangan industri yang dalam beberapa aspek belum memerlukan regulasi sekomples standar yang diusung negara-negara maju melalui *Basel Committee on Banking Supervision*.

Setidaknya, IFSB telah merilis 11 standar dan 6 pedoman yang diadopsi sejumlah anggota. BI sejak awal ikut merumuskan berbagai standar IFSB senantiasa aktif berkontribusi, juga telah mengadopsi beberapa standar ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Misalnya regulasi mengenai kecukupan modal bank syariah



yang diadaptasi dari IFSB *standard on Capital Adequacy for Institutions (Other Than Islamic Insurance (Takaful) Institutions) Offering Islamic Financial Services*. Demikian pula regulasi mengenai *corporate governance* yang kini diterapkan, juga sudah mengadopsi *best practices* yang direkomendasikan dalam standar-standar IFSB terkait *corporate governance*.

Penerapan berbagai regulasi tersebut diharapkan dapat mengangkat standar bank-bank syariah nasional sebagai bank berstandar global yang handal dalam berinteraksi dan berkompetisi dengan perbankan syariah internasional. Ke depan, perbankan syariah Indonesia akan terus mengembangkan dan mengambil manfaat dari interaksi dengan komunitas internasional, guna mewujudkan salah satu sasaran dalam Cetak Biru Perbankan Syariah yaitu penguasaan pasar keuangan syariah domestik dengan kualifikasi internasional. ●



R. Eko Adi Irianto,
Peneliti Bank Muda Senior,
Direktorat Perbankan Syariah BI

Apa Sih iB (ai-Bi)...??

iB (baca ai-Bi) singkatan dari Islamic Banking. Diresmikan 2 Juli 2007, sebagai penanda identitas bersama industri perbankan syariah di Indonesia.



Kehadiran logo iB (ai-Bi) memudahkan masyarakat untuk mengenali secara cepat dan menemukan kelebihan layanan perbankan syariah untuk kebutuhan transaksi keuangannya.

Logo iB (ai-Bi) menjadi penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama sistem perbankan syariah yang moderen, transparan, berkeadilan, seimbang dan beretika yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kemitraan.



Logo iB (ai-Bi) bukan merujuk kepada nama bank tertentu, tapi merefleksikan kebersamaan seluruh bank syariah di Indonesia untuk melayani masyarakat tanpa terkecuali.

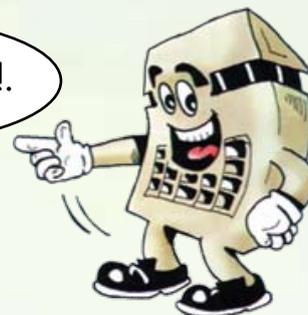


Kalau kenal logo iB, jadi lebih mudah untuk mendapatkan manfaatnya. mengenali logo lainnya.



jadi lebih mendapatkan Semudah layanan

Keren kan ...???!!!



KETAWA ALA BI

Aku Akan Datang!!!



Cewek : "Abang, abang benar-benar cinta gak sama aku?"
 Cowok : "Tentu dong!"
 Cewek : "Buktinya?"
 Cowok : "Walaupun laut terbentang luas di antara kita, aku akan berenang untuk sampai ke tempatmu."
 Cewek : "Terus?"
 Cowok : "Walaupun beribu-ribu gunung menghalangi kita, aku akan mendakinya untuk terus bersamamu."
 Cewek : "Benar?"
 Cowok : "Benar dong, dan WALAUPUN HUJAN BADAI MENGHADANG, AKU AKAN MENEROBOSNYA UNTUK TERUS MENDATANGIMU"
 Cewek : "Terus kenapa kemarin gak datang?"
 Cowok : "GERIMIS..."

Mainin HP Malam-malam

Penjaga Kuburan : "Mbak ngapain malam-malam gini mainin *handphone* di atas kuburan?"
 Sang cewek : "Iya pak, abis di bawah sinyalnya lemah..."

Kenapa Saya Ditilang Pak?

Pemuda: "Apa salah saya Pak? Saya pakai helm, pakai jaket, punya SIM, STNK bawa, kenapa saya ditilang?"
 Polisi : "Sebel aja saya lihat kamu... muter2 pakai jaket dan pakai helm tapi nggak pakai motor"

Tiga Orang Pemabuk dan Kereta Api

Tiga orang pemabuk tiba di stasiun kereta api beberapa saat sebelum kereta berangkat.
 Karena melihat ketiga pemabuk itu sempoyongan seperti tidak mampu naik kereta api, maka kepala stasiun yang baik hati membantu mereka naik. Ia sudah membantu dua orang naik kereta sebelum kereta berangkat, dan meminta maaf kepada seorang pemabuk lagi yang terpaksa tertinggal kereta api tadi. "Maaf tuan", katanya. "Sebetulnya saya sangat ingin membantu Anda naik kereta", kata kepala stasiun.
 "Tidak apa-apa", jawab sang pemabuk yang tertinggal. "Teman saya akan lebih menyesal lagi. Mereka sebetulnya hanya mengantar saya ke stasiun".



UMKM di Makassar

Kepincut Bank Syariah



Seminar Bank Syariah di KBI Makassar.

Ada sebuah “stigma” yang sepertinya Anggak pernah mudah dilepaskan dibenak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bila bicara urusan dengan bank, ribet! Makanya banyak UMKM yang tak berani menyambangi kantor bank untuk menjajaki pembiayaan. Dari sinilah para UMKM lalu mencari alternatif pembiayaan yang memahami kondisi mereka dan kalau boleh sih selaras dengan keyakinan agama. Itu pula yang membuat UMKM di Makassar, Sulawesi Selatan mencoba

untuk mendekati bank-bank syariah. Untuk membangun jembatan yang mempertemukan dua kepentingan sekaligus—antara UMKM dan bank syariah—Kantor Bank Indonesia di Makassar bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sulawesi Selatan menggelar seminar bertajuk “Pola Pembiayaan Syariah Bagi UMKM”, 18 Agustus 2011.

“Acara ini digelar dengan telah memperhatikan secara seksama penting pengembangan pembiayaan syariah bagi UMKM mengingat kultur dan budaya masyarakat di Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai masyarakat religius dan sebagian masyarakat cenderung untuk berinvestasi melalui pembiayaan yang

bersifat syariah,” ujar Pemimpin BI Makassar, Lambok Antonius Siahaan di hadapan 140 pelaku UMKM yang berdatangan dari kota Makassar dan sekitarnya. Agar pembahasan tentang produk dan jasa perbankan lebih afdol, para pembicara pada seminar itu pun berasal dari pelaku perbankan syariah seperti Kepala Bank Muamalat dan Kepala Bank BNI Syariah di Makassar yang diperkaya dengan gambaran profil perbankan syariah oleh Peneliti Ekonomi Madya Senior KBI Makassar. Seminar ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Selatan. Setelah mendengar berbagai paparan tentang perbankan syariah dari berbagai sudut, wah ... di akhir acara, para UMKM itu pun mulai kepincut terhadap perbankan syariah.●



KBI Gorontalo Lestarkan Tenun Langka Karawo



Ibu Darmin Nasution dan Ibu Jero Wacik memperhatikan pembuatan tenun Karawo di stand BI.

Indonesia kaya akan ragam warisan budaya. Tengoklah di Pameran Kerajinan Indonesia Sebagai Warisan Budaya (KRIDAYA) yang digelar di Jakarta, 3-7 Agustus 2011 lalu. Begitu banyak kerajinan dari berbagai daerah yang menjadi sumber kekayaan budaya (*national heritage*) bangsa ini. Sebut saja diantaranya seperti batik, bordir, keris, angklung, tenun, sulam, songket, perhiasan, wayang kulit dan

produk kerajinan tangan lainnya. Dari beragam karya kerajinan yang dipamerkan, ada satu kerajinan sulam asal Gorontalo yang sempat mencuri perhatian pengunjung termasuk Ibu Jero Wacik (istri Menteri Pariwisata) dan Ibu Darmin Nasution (istri Gubernur Bank Indonesia). Namanya tenun Karawo.

“Ohh ... begitu ya cara membuat,” komentar Ibu Jero Wacik yang disertai Ibu Darmin Nasution saat melihat langsung pembuatan tenun Karawo mulai dari mengiris, mencabut hingga menyulam yang sangat membutuhkan ketelitian dan kecermatan.



Kebetulan kerajinan Karawo mejeng di stand Bank Indonesia di pameran itu. Lho kok stand BI memamerkan tenun Karawo? Ya, memang sudah sejak beberapa silam, Kantor Bank Indonesia Gorontalo mengambil inisiatif melestarikan kerajinan Karawo sebagai aset warisan budaya Nusantara. Caranya dengan melatih masyarakat di sana—sebagian santri-santri dari sejumlah pesantren di Gorontalo dan sebuah rumah panti asuhan—bagaimana membuat tenun Karawo.

“Ini adalah salah satu peran KBI Gorontalo dalam upaya menyelamatkan dan melestarikan budaya luhur Gorontalo,” kemuka Wahyu Purnama A., Pimpinan BI Gorontalo ketika membuka pelatihan membuat tenun Karawo. Sejak bulan Maret 2011 lalu setidaknya sudah empat kali pelatihan sejenis digelar KBI Gorontalo, masing-masing diikuti lebih dari 200 peserta. Dalam pelatihan ini ikut menjadi nara sumber Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gorontalo dan PNPMM Mandiri Gorontalo.●

■ BI - Eye Clinic Goes to School:

Horee ... Bisa Ngeliat Dengan Jelas Lagi

Waktu baru menunjukkan pukul 06.10, hari itu Senin, 15 Agustus 2011, wajah-wajah ceria ratusan siswa-siswi SD Diniya Aisyah, Menteng Bata, Jakarta Selatan sudah terlihat di halaman sekolah. Mereka bukan sedang bersiap-siap untuk upacara bendera, tapi menanti kedatangan Tim Bank Indonesia Social Responsibility (BSR) dan Yayasan Rumah Peradaban (YRP). Begitu rombongan Tim BSR & YRP tiba, berhamburanlah mereka menyambut dengan suka cita. Maklumlah, hari itu Tim BSR & YRP akan menggelar program klinik mata gratis bertajuk "BI-Eye Clinic Goes to School". Satu per satu anak-anak di sekolah itu diperiksa matanya. Bagi anak-anak yang matanya kedapatan minus akan diberi kacamata gratis. Kegiatan yang sama juga pernah dilakukan di SDI Daarut Tauhid Cilincing - Jakarta Utara pada 8 Agustus 2011.

Kegiatan sosial ini bertaut dengan agenda dan visi *World Health Organization* (WHO)

tahun 2020 dan program Pemerintah. Kepedulian ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya hak setiap orang memperoleh penglihatan yang sehat (*The Right to Sight*) dan bebas buta mata di tahun 2020. Ada fakta yang cukup memprihatinkan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah kebutaan tertinggi di Asia yakni



sekitar 1,5% dari jumlah penduduknya. Sekarang bayangin setiap satu jam ada 12 juta penduduk dunia mengalami kebutaan, dan diperkirakan ada satu orang Indonesia yang terhisap didalamnya.

Sementara itu, bila melihat data tadi dari sisi kelompok umur, fakta memperlihatkan bahwa 10 persen dari 66 juta anak sekolah atau 6,6 juta anak sekolah di Indonesia mengalami kelainan refraksi yakni mata minus dan harus menggunakan kacamata. Kelainan refraksi pada anak sekolah jelas akan menyebabkan gangguan pada kesehatan mata yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar anak. Besarnya angka anak-anak mengalami gangguan mata tak lepas dari minimnya kesadaran untuk memeriksakan mata. Salah satu picunya adalah mahal biaya pemeriksaan dan pemilikan kaca mata.

"Kami dari Bank Indonesia berupaya membantu upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan khususnya di level pendidikan dasar. Program BI-Eye Clinic Goes to School merupakan salah satu bentuk kepedulian kami, untuk membantu kondisi rendahnya kualitas penglihatan yang dihadapi anak-anak SD saat ini. Di sisi lain biaya periksa mata dan harga kaca mata yang mahal tentu menjadi alasan mengapa banyak orang tua tidak mampu memeriksakan kondisi kesehatan mata anaknya" demikian ungkap Andiawiana S, Analis Eksekutif di Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI.

Nikmati kelebihan layanan perbankan syariah yang beragam, modern, mudah dan nyaman.

Informasi lebih lanjut :
Gerai Info Bank Indonesia Lobby Menara Sjafruddin Prawiranegara
atau Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, T. 6221 381 8371 F. 6221 350 1989
www.bi.go.id

Karena perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Segenap Redaksi gerai info mengucapkan:

مِنَ الْمَالِ الْغَنِيِّ
MINAL AIDIN WAL FA IDZIN

